

# JURNAL HAM

VOLUME 9 NOMOR 2, DESEMBER 2018

## FOKUS DAN RUANG LINGKUP

Jurnal HAM merupakan majalah ilmiah yang memfokuskan pada bidang Hak Asasi Manusia.

## LEMBAGA PENERBIT

Jurnal HAM diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

p-ISSN 1693-8704

e-ISSN 2579-8553

Edisi jurnal elektronik tersedia pada:

<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham>

## INDEKSASI

Google Scholar; Indonesian Scientific Journal Database (ISJD); Public Knowledge Project (PKP) Index; CiteU-Like; Academic Research Index (Research Bib); Zotero; Indonesia One Search; Neliti; dan Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Indonesian Publication Index (IPI).

## FREKUENSI PUBLIKASI

Terbit sebanyak dua kali dalam setahun, pada bulan Juli dan Desember.

## KETENTUAN BIAYA PUBLIKASI ARTIKEL

Setiap artikel yang disampaikan ke Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tidak dikenakan 'Biaya Pemrosesan Artikel'. Ini mencakup review mitra bestari, pengeditan, penerbitan, pemeliharaan dan pengarsipan, dan memungkinkan akses langsung ke versi teks lengkap dari artikel.

## ALAMAT KORESPONDENSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jalan H.R. Rasuna Said  
Kavling 4-5, Jakarta Selatan  
12940  
Telepon 021- 2525015  
Faksimili 021-2526438  
Laman : [www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id)  
Email: [ejournalham@gmail.com](mailto:ejournalham@gmail.com)

Jurnal HAM Indexed by:



PKP|INDEX



zotero





# JURNAL HAM

## VOLUME 9 NOMOR 2, DESEMBER 2018

Jurnal HAM merupakan majalah Ilmiah yang memuat naskah-naskah di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berupa hasil penelitian, kajian dan pemikiran di bidang HAM. Jurnal HAM terbit secara berkala 2 (dua) nomor dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

1. **Pembina** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. **Pengarah** :
  1. Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM
  2. Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
  3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
  4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
  5. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
3. **Redaktur/Dewan Redaksi** :
  1. Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU
  2. Firdaus, S.Sos., M.H.
4. **Tim E-Journal**  
**Journal Manager** : Fitriyani, S.H., M.Si.  
**Penyunting/Editor**
  1. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.
  2. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
  3. Harison Citrawan, S.H., L.L.M.
5. **Sekretaris** :
  1. Asmadi, S.H.
  2. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
4. **Tata Usaha** : 1. Suwartono
5. **Teknologi Informasi dan Desain Layout** :
  1. Risma Sari, S.Kom., M.Si.
  2. Machyudhie, S.T.
  3. Agus Priyatna, S.Kom.
6. **Mitra Bebestari** :
  1. Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.  
(Universitas Diponegoro/Hukum Internasional, Hukum Lingkungan)
  2. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.H.  
(Universitas Diponegoro/Hukum Internasional, Hukum Kekayaan Intelektual)
  3. Dr. Lita Tyesta A.L.W., S.H., M.Hum.  
(Universitas Diponegoro/Hukum Konstitusi)
  4. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.  
(Universitas Jember/Hukum Konstitusi, Legal Theory)

### **Alamat Redaksi**

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)  
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimili (021) 2522952  
E-mail: [ejournalham@gmail.com](mailto:ejournalham@gmail.com) / [pusbangdatin@gmail.com](mailto:pusbangdatin@gmail.com)

### **Percetakan PT. Pohon Cahaya**

Jl. Gedung Baru Nomor 18 Jakarta Barat (11440)  
Telepon (021) 5600111; Faksimili (021) 5670340

### **Catatan**

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan- tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: [ejournalham@gmail.com](mailto:ejournalham@gmail.com) / [pusbangdatin@gmail.com](mailto:pusbangdatin@gmail.com) serta wajib mengupload tulisan tersebut melalui Open Journal System (OJS) pada [ejournal.balitbangham.go.id](http://ejournal.balitbangham.go.id).

## DAFTAR ISI

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>          | <b>v</b>   |
| <b>PENGANTAR REDAKSI .....</b>   | <b>vii</b> |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b> | <b>ix</b>  |
| <b>KUMPULAN ABSTRAK .....</b>    | <b>xi</b>  |

|                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten<br>( <i>Single Candidate in the Perspective of the Right to Vote and be Voted<br/>in Province of Banten</i> )..... | 103 - 120 |
| Tony Yuri Rahmanto                                                                                                                                                                           |           |

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan<br>( <i>Corruption and Human Rights in Forestry Sector</i> )..... | 121 - 138 |
| Fauziah Rasad                                                                                                          |           |

|                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Ketertiban Umum dalam Kasus GKI Yasmin Bogor<br>( <i>Human Rights Perspective Concerning Public Order on GKI Yasmin Bogor Case</i> )..... | 139 - 152 |
| Jayadi Damanik                                                                                                                                                                 |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Indonesia di Persimpangan: Urgensi Undang-Undang Keadilan Gender”<br>di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Tahun 2017<br>( <i>Indonesia at a Crossroads: The Urgency of “Gender Equality and Justice Act” in Indonesia<br/>After Buenos Aires Joint Declaration in 2017</i> )..... | 153 - 174 |
| Indra Kusumawardhana dan Rusdi J. Abbas                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

|                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pelayanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses<br>oleh Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM<br>( <i>Public Transportation Services Easily Accessed Accessed<br/>by People with Disabilities in Human Rights Perspective</i> )..... | 175 - 190 |
| Marwandianto                                                                                                                                                                                                                                |           |

|                                                                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar dalam Perspektif Hak Asasi Manusia<br>( <i>Provision of Personal Information in Prepaid SIM Card Registration<br/>from Human Rights Perspective</i> )..... | 191 - 204 |
| Cynthia Hadita                                                                                                                                                                                            |           |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>BIODATA PENULIS .....</b> |  |
|------------------------------|--|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>PEDOMAN PENULISAN .....</b> |  |
|--------------------------------|--|



## PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga di penghujung tahun 2018 ini Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi kedua yaitu Jurnal HAM Volume 9 Nomor 2 Desember 2018. Seperti penerbitan pada volume sebelumnya, pada volume kesembilan dimuat 6 (enam) tulisan karya-karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Pada terbitan Volume 9 Nomor 2 Desember Tahun 2018, Jurnal HAM menerbitkan tulisan yang mengulas beragam isu HAM, yaitu hak memilih dan dipilih, prinsip ketertiban umum dikaitkan dengan kebebasan beragama, hak asasi dalam sektor kehutanan, kesetaraan gender, perlindungan data pribadi, serta hak penyandang disabilitas. Tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mitra Bebestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulils. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan *Open Jurnal System* maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2018

Redaksi



## **UCAPAN TERIMA KASIH UNTUK MITRA BEBESTARI**

Redaksi Jurnal HAM mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada mitra bebestari yang telah mereview artikel-artikel yang diterbitkan dalam Jurnal HAM Volume 9, Nomor 1, Edisi Juli 2018. Mitra bebestari tersebut yaitu:

1. Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum. (Universitas Diponegoro/Hukum Internasional, Hukum
2. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.H. (Universitas Diponegoro/Hukum Internasional, Hukum Kekayaan Intelektual)
3. Dr. Lita Tyesta A.L.W., S.H., M.Hum. (Universitas Diponegoro/Hukum Konstitusi)
4. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (Universitas Jember/Hukum Konstitusi, Legal Theory)



**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.**

**This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge**

**Tony Yuri Rahmanto** (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights*)

***Single Candidate in the Perspective of The Right to Vote and be Voted in the Province of Banten***

Human Rights Journal, Vol. 9, Number 2, December 2018, page 103 - 120

The feature of single candidate pair in simultaneous regional election of 2018 can now be seen again, however the feature in one side has provided different political dynamics in Indonesia but on the other hand has been indicated as positioning the regional election as an election process that does not necessarily need options which in turn may degrade the participative element of the people in the democracy process. The purpose of this article is to find out whether the regional election with only one single candidate in the Province of Banten has been appropriate with respect to the Right to Vote and be Voted and the mechanism to prevent the raise of only one single candidate in the simultaneous regional election, in particular in the Province of Banten. This study is a juridical empirical study with qualitative approach for the purpose of discovering a facts and presenting the conditions, phenomenon, and situation that occur during the study. According to this article, a fact has been discovered that in the implementation no guarantee or complete fulfilment of right has been seen that the regional election with only one single candidate as the realization of people sovereignty is appropriate when viewed from the perspective of human rights. Within the context of Regional Election, one of the indication of contestation appropriate from the perspective of human rights is that the realization must ensure the space or opportunity for the candidates, in this case pair of candidates, and the people to materialize their sovereignty in exercising their rights, both right to vote and right to be voted.

**Keywords:** Single Candidate, Right to Vote and be Voted, Regional Election

**Fauziah Rasad** (*National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia*)

***Corruption and Human Rights in Forestry Sector***

Human Rights Journal, Vol. 9, Number 2, December 2018, page 121 - 137

Issuance of licenses related to the utilization of forestry areas has been susceptible to corruptions (crime), among others the one that leads to land seizure. This research is aimed to study the relationship between corruption and Human Rights (HAM) in forestry industry employing qualitative approach by means of literature study, expert opinions, and case study. Corruption in forestry industry has given rise to violations of human rights of the community that count their lives on forestry resources, in particular the right related to title over lands. This violation in turn has affected also the other rights, such as the right to welfare including right to work, right to information, right to speak, right to good and healthy living environment, and right to feel secure. On the other hand, human rights violation against the people may giving a rise to corruptions, for example violation against the right to information may cause the people to lose their chance to defend their rights related to their land ownership. The Corruption Eradication Commission has been able only to prove the state's financial losses, while the state's economic losses, not to mention human rights losses due to the violations, cannot be proved. Bringing corruptor to court has not been able to recover the human rights violated by such corruption crime. This research suggests that corruption prevention may employ human rights advancement approach, and vice versa, while the corruption law enforcement must have been able to recover the violated rights of the people.

**Keywords:** Human Rights, Forestry, Corruption

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.  
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge**

**Jayadi Damanik (University of National Jakarta)**

***Human Rights Perspective Concerning Public Order on GKI Yasmin Bogor Case***

Human Rights Journal, Vol. 9, Number 2, December 2018, page 139 - 152

*This article describes the analysis of public order principle (POP) in human rights perspective by referring to the ICCPR and the ICESCR and its implementation on the Yasmin Indonesian Christian Church (GKI Yasmin) Bogor case regarding its relation to the policy of local government (the mayor) of Bogor. The mayor then revoked the permit of the building, categorized as an administrative legal action which is not identifying the POP. Therefore, the implementation of the POP through the policy of Bogor local government has no legal basis. The POP actually has to be used for controlling so that there is no violation of fundamental elements of legal system, but unfortunately it was used for human rights violation. The policy of Bogor local government has no contribution to legal utility or legal usefulness. The policy of local government of Bogor seems to be the policy in a colonial era (that was the undisturbed colonialist's interest) and the relation to the state security, by using the state apparatus or the intolerant group; moreover, it seems to be the policy in New Order era, that was used for legal binding exceptionality, especially in human rights law, that is the freedom of religion and conscience of GKI Yasmin congregation. The policy of Bogor local government applied POP in negative function (making less legal binding), effecting violation or wiping out the fundamental elements of legal system, that is the freedom of religion of GKI Yasmin congregation in its religious expression. The policy of Bogor local government applied POP in negative-internal function, that is limiting the rights of GKI Yasmin congregation, that categorized as human rights violation.*

**Keywords:** Human Rights, Public Order, Yasmin Indonesian Christian Church

**Indra Kusumawardhana and Rusdi J. Abbas (Department of International Relations Faculty of Communication and Diplomacy Universitas Pertamina)**

***Indonesia at a Crossroads: The Urgensi of "Gender Equality and Justice Act" in Indonesia After Buenos Aires Joint Declaration in 2017***

Human Rights Journal, Vol. 9 Number 2, December 2018, page 153 - 174

*Post WTO's Joint Declaration on Trade and Economic Empowerment of Women in December 2017, at Buenos Aires, the involvement of Indonesia made it stand on the crossroads. Nonetheless, the polemic of gender equality and justice remains a task far from the end for Indonesia, especially if it refers to the fact that Indonesia has not yet completed the ratification of Law on gender equality and equity (KKG). In fact, the substance of the Joint Declaration of Buenos Aires is the emphasis on gender equality and justice on economic activity, the absence of laws capable for regulating corporate behavior toward gender equality and justice in Indonesia will be a bad precedent in the future. In this context, this study probe the urgency of Law on Gender Equality and Equity (KKG) in addressing Indonesia's involvement in the Joint Declaration of Buenos Aires. The core question, to tackle, why does Law on Gender Equality and Equity is important post Indonesia's involvement in WTO's Joint Declaration on Trade and Economic Empowerment? Utilizing some basic concepts such as globalization of economy, human rights, and gender perspective approach; as well as using qualitative methodologies in analyzing the problems. This article will conduct a socio-legal analysis of the urgency of the Gender Equality and Justice Act after Indonesia's involvement in the Buenos Aires Joint Declaration on Trade and Women's Economic Empowerment.*

**Keywords:** Globalisation of Economy, Human Rights, Gender Equality and Equity, Indonesia, World Trade Organization

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.  
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

**Marwandianto (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights)**

**Public Transportation Services Easily Accessed by People with Disability in Human Rights Perspective**

Human Rights Journal, Vol. 9, Number 2, December 2018, page 175 - 190

*This research is aimed to review the substance of the Law No. 8 of 2016 regarding People with Disabilities. Article 105 to 108 of this Law provides for the public services easily accessed by People with Disability. This research focuses to the forms of public services in transportation easily accessed by People with Disability. This research employs qualitative method that generates discreet data. Not all transportation mode has accommodated the needs of the deafs and blinds. Not all public services have provided easy access to the people with physical disabilities in particulars those who wear wheelchairs or crutches. Provision of public transportation services easily accessed by People with Disability are series of activities within the scope of fulfilling the needed services pursuant to the laws and regulations applicable to each citizens and residents that should be provided by the public services provider. While the public transportation services include also information and instruction to obtain services, information on available facilities, and information on available officers. The types and forms of the public transportation services easily accessed by People with Disability include land, air and railways transportation.*

**Keywords:** Public Transportation Services

**Cynthia Hadita (Faculty of Law University of Muhammadiyah North Sumatera)**

**Provision of Personal Information in Prepaid SIM Card Registration from Human Rights Perspective**

Human Rights Journal, Vol. 9, Number 2, December 2018, page 191 - 204

*There have been anxieties due to the the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 21 of 2017 regarding Second Amendment to the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 12 of 2016 regarding Registration of Telecommunication Service Subscriber. People are anxious since they have to provide their personal information written in their Resident Identity Card and Family Card within a specified time limit otherwise, their prepaid SIM card will be blocked. The state has yet to protect, as the guarantor of human rights, the personal information of the prepaid SIM card subscribers from misuse as there has been no sanctions provided for. The method employed in this research has been juridical normative by means of bibliographical study. Analysis uses qualitative analysis method. The study demonstrates that the relationship between the provision of personal information of prepaid SIM Card subscriber and the human rights in particular in the protection of personal information has been set out in Article 28 E, 28 F, and 28 G of the Constitution of the Republic of Indonesia and some regulations under it. The legal consequences suggest that the provision of the personal information in registration of prepaid SIM card has been in violation against the superior regulations that relate to human rights. Hence, with regard to the minister regulation, there may be two legal opportunities to challenge it, judicial review and/or constitutional review at the Supreme Court and/or the Constitutional Court levels respectively that may lead to the revocation of the regulation or revision of the relevant Law.*

**Keywords:** Registration, Regulations, Human Rights, Sanctions, Prepaid SIM Card

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel  
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

**Tony Yuri Rahmanto (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)**

**Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten**

Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, hal. 103 - 120

Fenomena pasangan calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2018 kembali hadir, akan tetapi hadirnya fenomena tersebut di satu sisi memberikan dinamika politik yang berbeda di Indonesia namun di sisi lain disinyalir menempatkan pilkada sebagai proses pemilihan yang tidak memerlukan pilihan sehingga dapat mendegradasi unsur partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang diikuti oleh calon tunggal di Provinsi Banten apakah sudah sesuai dengan perspektif hak memilih dan dipilih serta bagaimana mekanisme untuk mencegah terjadinya calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak khususnya di Provinsi Banten. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta dan menyuguhkan apa adanya keadaan, fenomena, serta keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan. Dalam penulisan ini menemukan fakta bahwa dalam tatanan implementasi belum terlihat adanya jaminan atau pemenuhan hak secara utuh bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti calon tunggal sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan perspektif HAM. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, salah satu ukuran kontestasi yang berperspektif HAM adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi peserta dalam hal ini pasangan calon dan masyarakat untuk memanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, dalam baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih.

**Kata Kunci:** Calon Tunggal, Hak Memilih dan Dipilih, Pilkada

**Fauziah Rasad (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia R.I.)**

**Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan**

Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, hal 121 - 138

Penerbitan izin terkait kawasan hutan rentan terhadap tindak pidana korupsi (korupsi), yang diantaranya berakibat pada pengambilalihan tanah. Penelitian ini bertujuan menelaah relasi antara korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sektor kehutanan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, pendapat ahli, dan studi kasus. Korupsi di sektor kehutanan menyebabkan terlanggarannya HAM masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan, khususnya hak milik atas tanah. Pelanggaran ini kemudian berdampak pada berbagai hak lainnya, seperti hak atas kesejahteraan termasuk hak atas pekerjaan, hak memperoleh informasi, hak menyampaikan pendapat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak atas rasa aman. Di sisi lain, pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya korupsi, misalnya hak memperoleh informasi yang membuka peluang masyarakat kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hak milik atas tanahnya. Komisi Pemberantasan Korupsi baru mampu membuktikan terjadinya kerugian keuangan negara, sementara kerugian perekonomian negara, terlebih lagi pelanggaran HAM, belum dapat dibuktikan. Pidana korupsi belum mampu memulihkan HAM yang terlanggar akibat korupsi. Penelitian ini menyarankan pencegahan korupsi dapat menggunakan pendekatan pemajuan HAM, dan sebaliknya, serta penegakan hukum atas korupsi seharusnya mampu memulihkan hak-hak asasi masyarakat yang dilanggar.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Kehutanan, Korupsi

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel  
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

**Jayadi Damanik (Universitas Nasional Jakarta)**

**Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Ketertiban Umum dalam Kasus GKI Yasmin Bogor**

Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, hal. 139 - 152

Tulisan ini menyajikan analisis tentang asas Ketertiban Umum (KU) dari perspektif HAM dengan merujuk pada ICCPR dan ICESCR serta penerapannya dalam kasus GKI Yasmin Bogor terkait kebijakan Pemerintah Kota Bogor yang membekukan IMB gereja tersebut dan mencabut IMB-nya sebagai perbuatan hukum administrasi yang tidak mengenal asas KU. Oleh karena itu, penerapannya melalui kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Asas tersebut harusnya digunakan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran sendi-sendi asasi dari sistem hukum, tetapi justru digunakan untuk melanggar HAM. Kebijakan tersebut tidak memberi kemanfaatan atau kegunaan hukum. Kebijakan tersebut bagaikan pada masa penjajahan (tidak terganggunya kepentingan Penjajah) yang dikaitkan dengan keamanan Negara, dengan alat-alat perlengkapan Negara atau dikaitkan dengan kelompok tertentu yang intoleran; bahkan bagaikan pada masa Orde Baru, digunakan dalam rangka pengecualian berlakunya hukum, yaitu hukum HAM, yakni hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan Jemaat GKI Yasmin. Kebijakan tersebut menerapkan asas KU dengan fungsi negatif (menjauhkan berlakunya hukum), berakibat dilanggarnya atau terhapusnya sendi-sendi asasi dari hukum itu sendiri, dalam hal ini hak atas kebebasan Jemaat GKI Yasmin untuk menjalankan agamanya. Kebijakan tersebut menerapkan asas KU dengan fungsi negatif-intern, yaitu membatasi hak para Jemaat GKI Yasmin, yang oleh karena itu tergolong sebagai pelanggaran HAM.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, Ketertiban Umum, GKI Yasmin

**Indra Kusumawardhana dan Rusdi J. Abbas (Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Komunikasi dan Diplomasi Universitas Pertamina)**

**Indonesia di Persimpangan: Urgensi “Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender” di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017**

Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, hal 153 - 174

Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires tentang Perdagangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan pada Desember 2017 silam, keterlibatan Indonesia kembali menjadikannya berada dipersimpangan jalan. Jika merujuk pada kenyataan bahwahingga kini Indonesia belum memiliki Undang - Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (UU-KKG), polemik kesetaraan dan keadilan gender tetap menjadi sebuah tugas yang jauh dari kata usai untuk Indonesia terutama dalam konteks penjaminan Hak Asasi Manusia. Padahal, substansi Deklarasi Bersama Buenos Aires adalah penekanan terhadap kesetaraan dan keadilan gender pada aktifitas ekonomi, dalam konteks tersebut, kajian ini dirajut dalam rangka mengangkat kembali urgensi UU-KKG, terutama dalam kaitan pemberdayaan ekonomi perempuan pasca Deklarasi Buenos Aires. Pertanyaan utama yang diajukan adalah mengapa UU-KKG penting bagi Indonesia pasca keterlibatannya di dalam Deklarasi Buenos Aires? Menggunakan pendekatan globalisasi ekonomi, hak asasi manusia, dan perspektif gender; serta menggunakan metodologi kualitatif dalam menganalisis permasalahan urgensi Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender setelah Indonesia terlibat di dalam Deklarasi Bersama Buenos Aires tentang Perdagangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.

**Kata kunci:** Globalisasi Ekonomi, Hak Asasi Manusia, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Indonesia, World Trade Organization

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel  
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

**Marwandianto (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)**

**Pelayanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM**

Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, hal 175 - 190

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 105 s.d 108 Undang-Undang ini berisi mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada bentuk pelayanan publik di bidang transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data diskriptif. Belum semua moda transportasi mengakomodir kebutuhan bagi tuna rungu dan tuna netra. Masih belum meratanya pelaksanaan pelayanan publik khususnya untuk Penyandang Disabilitas fisik yang memakai kursi roda atau tongkat penyangga. Pelayanan publik sektor transportasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sektor transportasi. Sedangkan bentuk pelayanan publik di bidang transportasi meliputi informasi dan petunjuk untuk memperoleh pelayanan, informasi ketersediaan fasilitas, serta informasi ketersediaan petugas. Jenis dan bentuk pelayanan publik khususnya di bidang transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas yaitu moda angkutan darat, moda angkutan udara, moda angkutan perkeretaapian.

**Kata Kunci:** Pelayanan Transportasi Publik

**Cynthia Hadita (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)**

**Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, hal 191 - 204

Gejolak yang muncul akibat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Masyarakat yang resah karena harus melakukan registrasi data pribadi menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dalam waktu yang ditentukan jika tidak kartu prabayarnya akan diblokir. Belum adanya sanksi bagi penyalahgunaan data pribadi pengguna kartu prabayar yang harus dilindungi negara sebagai penjamin hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaitan registrasi kartu prabayar dengan hak asasi manusia terutama dalam perlindungan data pribadi termaktub dalam Pasal 28 E, 28 F, dan 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta beberapa aturan dibawahnya. Akibat hukum registrasi kartu bertentangan dengan peraturan diatasnya yang terkait dengan HAM. Sehingga, peraturan menteri itu, dapat terjadi dua peluang akibat hukum yaitu judicial review dan/atau constitutional review di Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi yang dapat berujung pada pembatalan peraturan maupun revisi undang-undang terkait.

**Kata Kunci:** Registrasi, Regulasi, Hak Asasi, Sanksi, Kartu Prabayar